

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh efektifitas sistem informasi keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dengan dimoderasi teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Hasil regresi linear berganda diperoleh hasil Kualitas Laporan Keuangan = - 0,211 + 0,071 Efektifitas Sistem Informasi Keuangan Daerah + 0,098 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah + 0,334 Kompetensi Sumber Daya Manusia + 0,102 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, hal ini berarti terdapat hubungan positif antara efektifitas sistem informasi keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Hasil koefisien determinasi diperoleh Nilai *Adjusted R Square* (R^2) atau koefisien – koefisien adalah 0,409, angka ini mengidentifikasi bahwa kualitas laporan keuangan (variabel dependen) mampu dijelaskan oleh efektifitas sistem informasi keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman standar akuntansi pemerintah (variabel independen) sebesar 40,9%. Sedangkan

selebihnya 59,1% dijelaskan oleh sebab – sebab lain yang tidak diketahui dalam penelitian ini.

3. Efektifitas sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar. Hal ini berarti semakin dioptimalkannya sistem informasi keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
4. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar. Hal ini berarti semakin penerapan sistem pengendalian intern pemerintah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
5. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar.
6. Pemahaman standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar. Hal ini berarti semakin tingginya pemahaman sumber daya manusia pada OPD Kota Pematangsiantar mengenai standar akuntansi pemerintah. akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
7. Hasil uji F diperoleh bahwa efektifitas sistem informasi keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar.

8. Hasil pengujian digunakan dengan uji regresi moderasi menggunakan uji interaksi diperoleh pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh efektifitas sistem informasi keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah adalah merupakan suatu instrumen (*tools*) yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sebaiknya Pemerintah Kota Pematangsiantar harus tetap memastikan agar penerapan sistem tersebut berjalan dengan efektif dengan memperhatikan seluruh aspek yang meliputi kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan sistem, dampak individual dan dampak organisasi berjalan dengan baik, yaitu dengan cara melengkapi sistem informasi keuangan dengan program yang terintegrasi dari mulai perencanaan, penatausahaan sampai kepada pelaporan.
2. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebaiknya pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah. Melalui inspektorat sebagai unit yang berfungsi menjalankan aspek pengendalian intern pemerintah, maka penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap indeks maturitas harus dilaksanakan dengan lebih baik

lagi secara komprehensif dan terintegrasi pada semua *stakeholder* yang mendukung dimensi-dimensi pada sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

3. Sebaiknya OPD Kota Pematangsiantar meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu dengan melakukan pelatihan atau bimbingan teknik mengenai aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan agar SDM dapat memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
4. Sebaiknya OPD Kota Pematangsiantar memperhatikan pegawai yang menyusun laporan keuangan sebaiknya berlatar belakang akuntansi akan lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan karena telah melalui proses akademis dalam pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan. Adapun staff yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi bisa melalui berbagai pelatihan terlebih dahulu untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitatif
5. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebaiknya pemerintah daerah Kota Pematangsiantar sebaiknya mengembangkan suatu aplikasi dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah maka kualitas informasi keuangan menjadi semakin baik.

6. Sehubungan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penulis, penelitian ini masih terdapat kelemahan-kelemahan dan belum dapat mengungkap seluruh variabel yang dapat mempengaruhi Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar, sebaiknya untuk peneltiian selanjutnya menambahkan variabel lainnya.

